

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)
KECAMATAN WATANG SIDENRENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I : Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Gambaran Umum Organisasi	6
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.5. Komposisi SDM Organisasi	12
1.6. Isu Strategi	17
1.7. Landasan Huum	19
BAB II : Perencanaan Kinerja	20
2.1 Rencana Strategis Kantor Camat Watang Sidenreng	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
2.3 Indikator Kinerja Utama	23
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	38
BAB IV. : P E N U T U P	42
4.1. Simpulan Umum atas capaian Kinerja	42
4.2. Langkah Langkah Peningkatan Kinerja	42
Lanpiran	44

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Watang Sidenreng selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama /kedua /ketiga /keempat /kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj-IP Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Watang Sidenreng. Komitmen dalam penyusunan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Watang Sidenreng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Watang Sidenreng Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2022, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Empage, 27 Januari 2023
CAMAT WATANG SIDENRENG

HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP, M.Si

NIP. 19810109 200012 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kecamatan Watang Sidenreng melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kecamatan Watang Sidenreng untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kecamatan Watang Sidenreng untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Watang Sidenreng. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Watang Sidenreng ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Watang Sidenreng di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan

mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satumasukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkankinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Watang Sidenreng merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km². Kecamatan Watang Sidenreng membawahi 5 desa dan 3 Kelurahan yaitu Desa Mojong, Talumae, Damai, Talawe, Aka-Akae, Kelurahan Empagae, Kelurahan Sidenreng, dan Kelurahan Kanyuara dan secara geografis terletak di bagian Ibu ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 11 Km². Penduduk Kecamatan Watang Sidenreng, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Panca Rijang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pitu Riawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tellu limpoE
- Sebelah Barat : Kabupaten MaritengaE

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

- kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 18 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



STURKTUR ORGANISASI KECAMATAN WATANG SIDENRENG



C A M A T
HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP, M.Si



SEKRETARIS
JUMAIDI, SE

Kelompok Jabatan Fungsional

UPT PSDA : SUKRI, SE
 UPT KB : Hj. RUSIANA, S.Sos
 UPT Bapenda : H. MAKMUR ALI
 B P P : ANDI ODDANG, S.ST
 PUSKESMAS : SLFIAH, S.K.M



Kasubag. Keu & Perencanaan
MUH.HUSNI, S.IP



Kasubag. Umum & Kepeg.
NURDIN S.IP



NELLY



AMMAR

Kasi. Pemerintahan

Kasi. Ekobang
MUSTARI, S.Pd

Kasi. Kesra
KAMARIA S.SOS

Kasi Trantib
H. SARDI, S.Kom, M.Si
ST. MARAWIAH

Kasi. Pelayanan Umum
MUH. NASIR RAHIM, S.Sos

Kel. Empagae

Kel. Sidenreng

Kel. Kanyuara

Desa Mojong

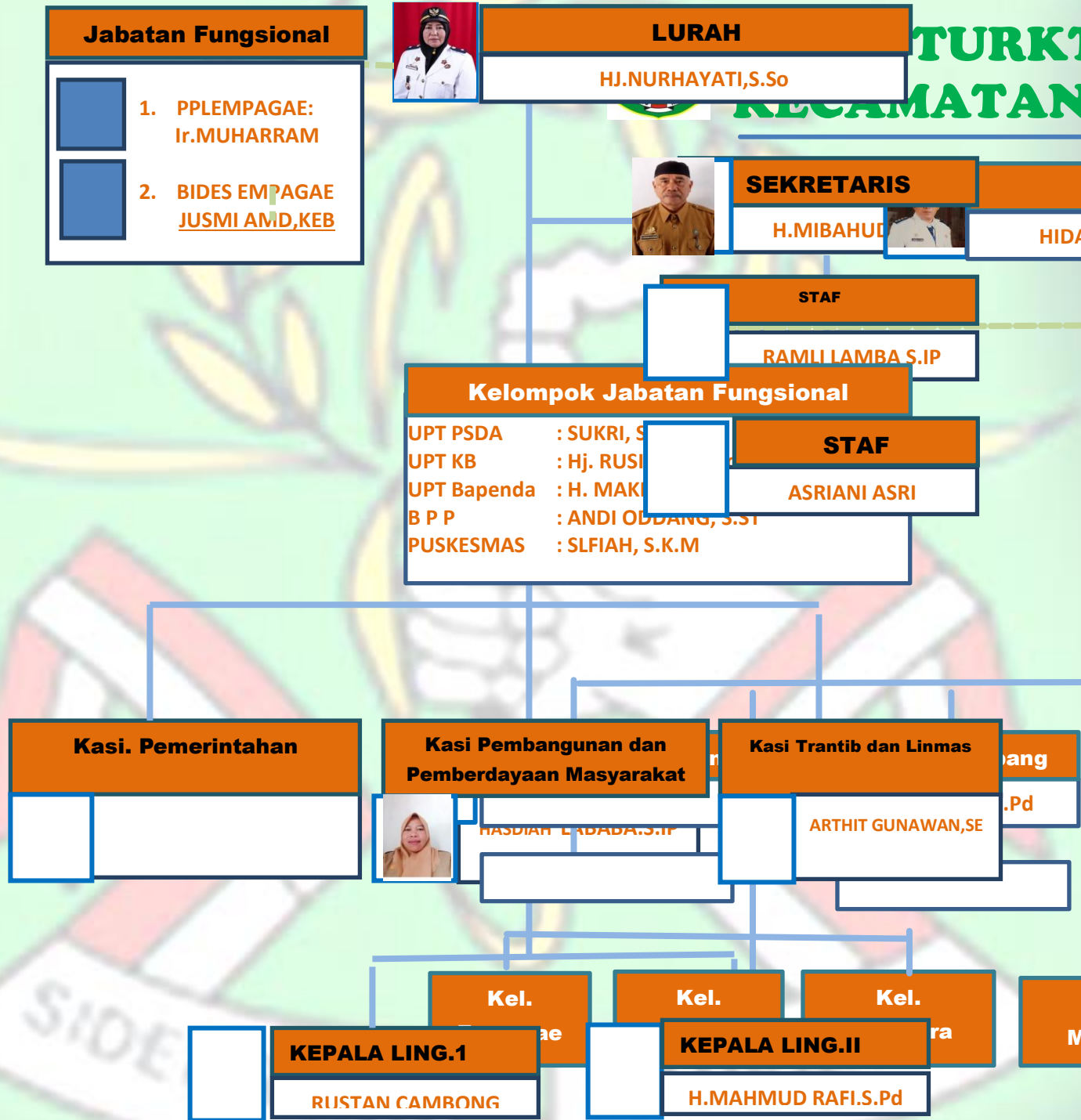
Desa Talumae

Desa AkaAkae

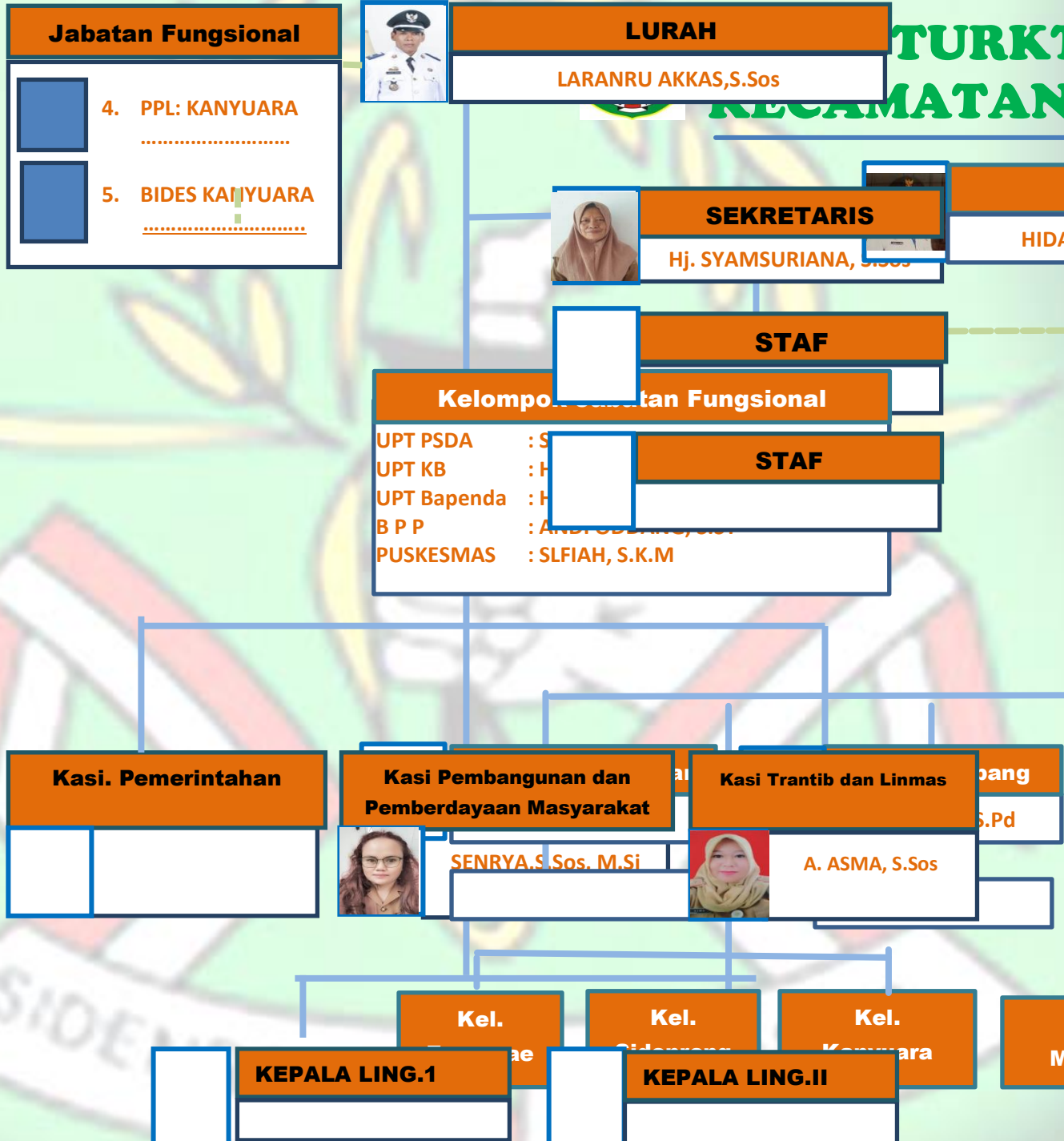
Desa Damai

Desa Talawe

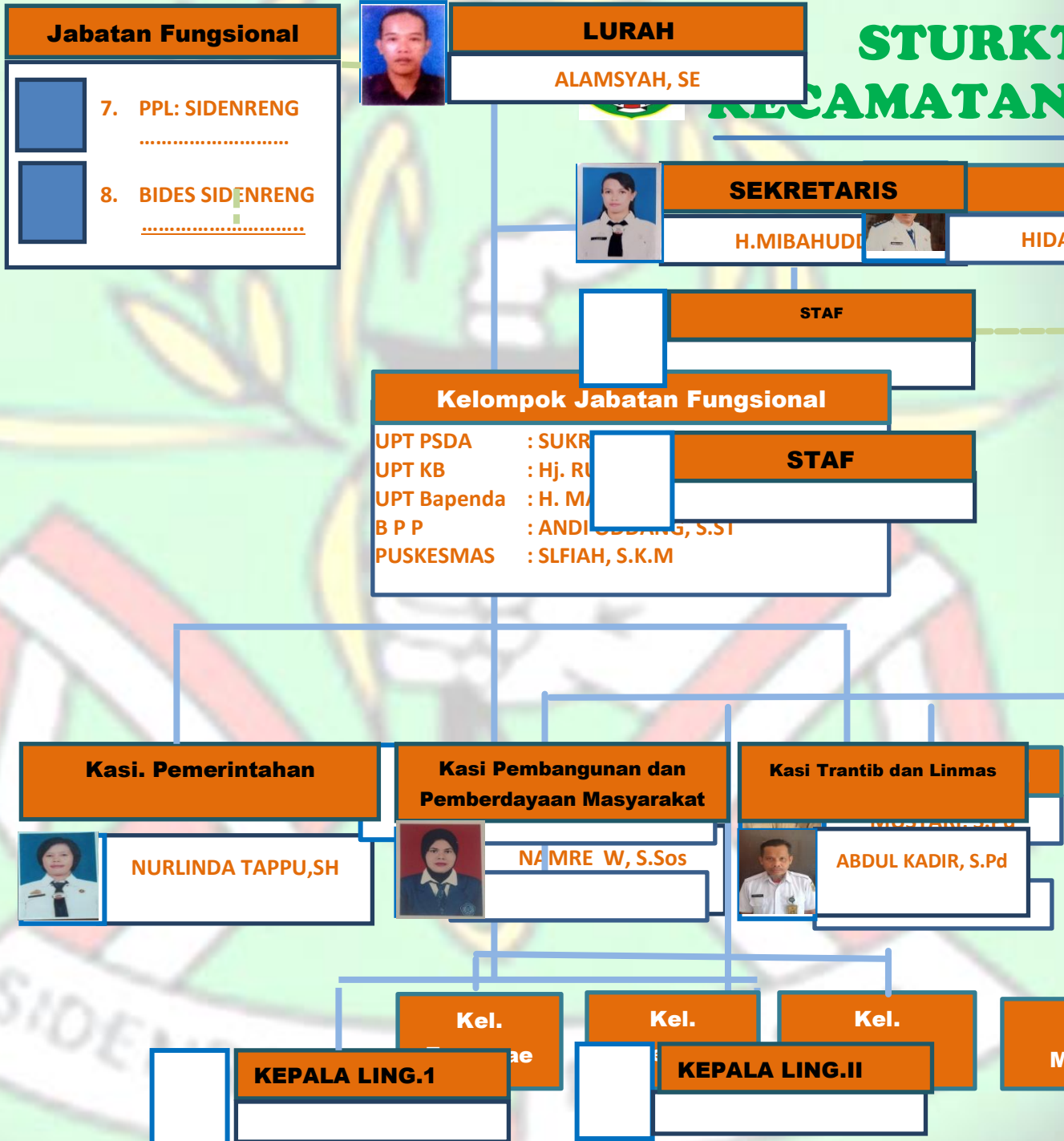
STURKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN EMPAGAE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



STURKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN SIDENRENG KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terdiri atas :

Kantor Kecamatan

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- **Kantor Kelurahan Empagae**
- **Kantor Kelurahan Kanyuara**
- **Kantor Kelurahan Sidenreng**

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Watang Sidenreng adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki komposisi

Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari 13 (Tiga Belas) orang Laki-laki dan 11 (Sebelas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh 31 orang tenaga Non ASN.

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Watang Sidenreng dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna

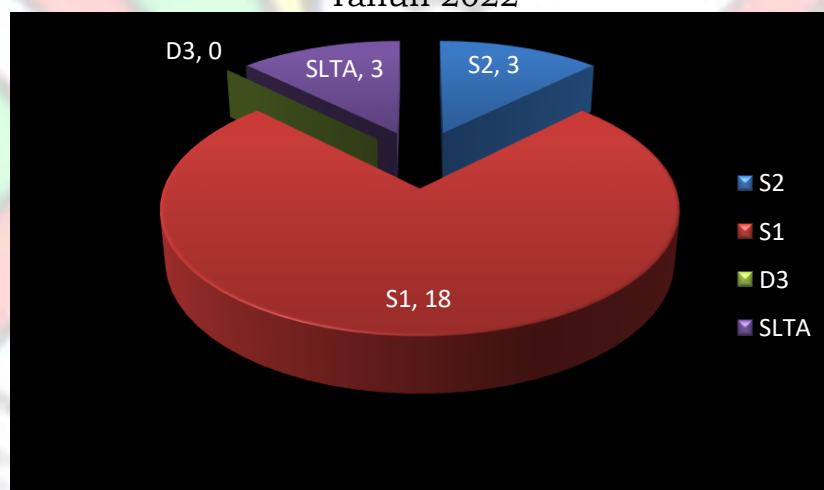
lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	3	2	1
2.	S1	18	9	9
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	3	2	1
JUMLAH		24	13	11

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022



Sedangkan Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 9 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dijelaskan dalam tabel di bawah ini

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022**

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	Hidayatullah Abbas, S.STP. M.Si	L	Camat	III
2.	Jumaidi, SE	L	Sekcam	III
3.	Hj. Namri, S.Sos	P	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	Kamariah, S.Sos	L	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	H.Sardi, S.Kom.M.Si	L	Kasi Terantibum	IVa.
6.	Mustari, SE	L	Kasi Pembangunan	IVa.
7.	Muh.Nasir Rahim, S.Sos	L	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8.	Muh.Husnu, S.IP	L	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9.	Nurdin N, S.IP	P	Kasubag. Kepegawaian	IVb.

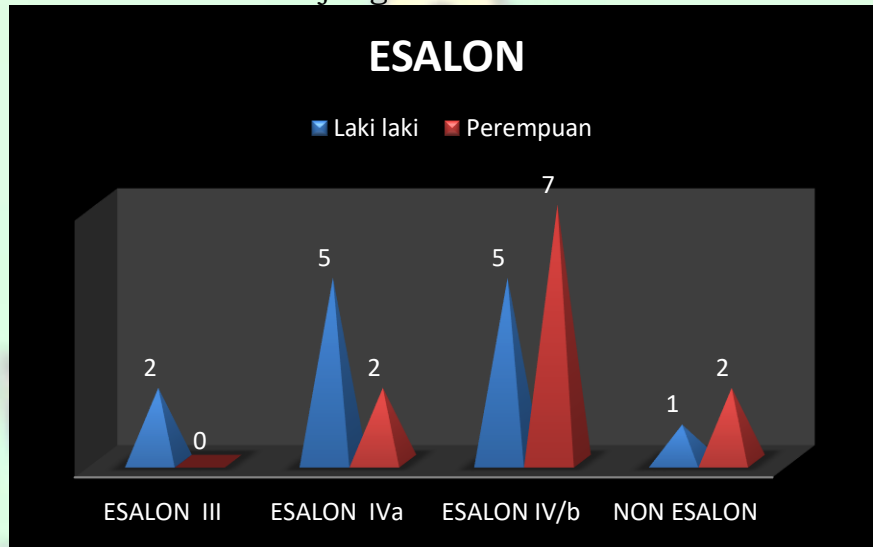
Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Komposisi ASN Non Eselon
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022**

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.		P	Analisis Pemerintahan
2.	St. Marawiah	P	Bendahara Pembantu BL
3.	Nelly	L	Bendahara Pembantu BTL-Gaji
4.		P	Pengelola Kepegawaian
5.	Ammar	L	Bendahara Pengeluaran
6.		P	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
7.			Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Berikut digambarkan Komposisi ASN menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin
menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



Komposisi ASN Menurut Golongan

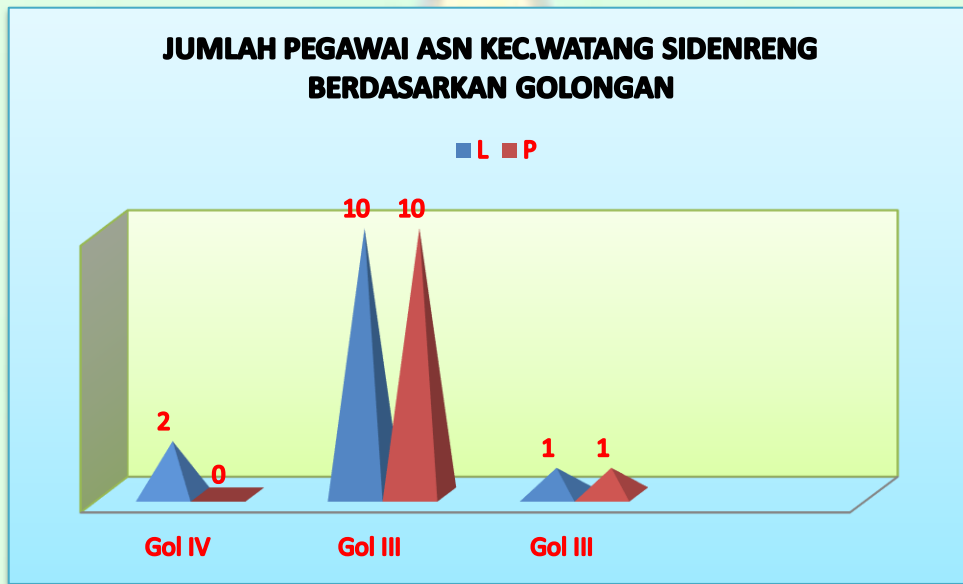
Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng menurut golongan Tahun 2022. ASN di Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang Dimana golongan IV sebanyak 2 (Dua) orang, Golongan III sebanyak 20 (Dua Puluh) Orang dan Golongan II sebanyak 2 (Dua) Orang. ASN Kecamatan Watang Sidenreng Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	0	2
2.	Golongan III	10	10	20
3.	Golongan II	1	1	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi ASN Kantor Kecamatan Watang Sidenreng per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2022



1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunandaerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Watang Sidenreng dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Kecamatan Watang Sidenreng dalam memajukan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2021, 061/067/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Watang Sidenreng berada pada misi 5 yaitu “ **Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance**” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera						
Misi 5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watang Sidenreng untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :
 - a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan
2. Arah Kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2022
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	78,32
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	73 %
	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %

	Meningkatnya Kelola Kinerja Keuangan	Tata dan	Predikat Nilai Sakip.	48,70 (C)
--	--	-------------	-----------------------	----------------

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Watang Sidenreng :

No.	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100	100 %	100 %
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	0	0	72 %	73 %	74 %
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100 %	100 %	100 %
5.	Predikat nilai sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Watang Sidenreng sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,32	82,70	107,21

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 82,70 dari target sebesar 78,32 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 107,21 % atau mencapai melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	78,32	82,70	5,56

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Watang Sidenreng diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	Kecamatan Watang Sidenreng	3,31	3,52	0,21	82,70	B	Baik

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	73	70,56	96,53

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 70,56 % dari target sebesar 73 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,53 % atau mencapai target.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2021 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau

mencapai target.

Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1.	Predikat Nilai SAKIP	40,88 (C)	40,88 (C)	100 %

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2022 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun lalu sebagai berikut :

Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,32 (C)	77,14 (B)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Watang Sidenreng mengalami peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Pada tahun 2021 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77,14 % dan tahun ini meningkat 78,32 %.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2022 dengan 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	2021	3,08	3,00	0,08	77,14	C	Kurang Baik
2.	2022	3,31	3,52	0,21	78,32	B	Baik

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021 (%)	2022
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2021 sebesar 0 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng. Untuk mencapai indicator sasaran tersebut pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembagunan dan pemerintahan.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021 (%)	2022 (%)

1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	78,32
----	---	---	-------

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2021 sebesar 0 % dan di tahun 2022 sebesar 78,32 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2021 sebesar 0 %, hal ini dikarenakan didalam renstra induk Kecamatan Watang Sidenreng sasaran untuk indikator tersebut belum tercover atau hanya tersirat saja, barulah di renstra perubahan dimasukkan sebagai indikator yang harus dicapai untuk mencapai visi misi bupati terpilih.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021	2022
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	0	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tidak dapat kami perbandingkan, sasaran tersebut baru dimunculkan di renstra Perubahan. Sama halnya dengan indikator sasaran 2, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa telah dilaksanakan setiap tahunnya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 4			
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2020 (%)	2021 (%)

1.	Predikat Nilai SAKIP	32,54	40,88
----	----------------------	-------	-------

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2020 dengan capaian 32,54 % meningkat menjadi 40,88 %.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,14 (B)	77,14 (B)	82,33 (B)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 80,14 dan target Renstra dengan nilai 77,14. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 82,33. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 77,14, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng untuk indicator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 82,33 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2022 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2022, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{3 Urusan}} \times 100 \%$$

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sasarannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	72	72	78,32

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 72 % dan target Renstra dengan nilai 72 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng hanya sebesar 78,32 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 72 %, maka realisasi tahun 2022 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{2 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat

kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2022 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 79 % dan tudang sipulung adalah 60 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 78,32 % dan tidak mencapai target yang ditentukan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarasran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{\text{Jumlah Desa/ Kel yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa/Kel}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{5 \text{ Desa/3 Kel}}{5 \text{ Desa/3 Kel}} \times 100 \%$$

Adapun jumlah desa di Kecamatan Watang Sidenreng adalah 5 desa dan 3 Kelurahan yaitu desa Mojong, Talumae, Damai, Aka-Akae, Talawe Kelurahan Kanyuara, Kelurahan Empagae dan Kelurahan Sidenreng

Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2022 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2022 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2021 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2021 (%)
1.	Predikat nilai SAKIP	B	C	C

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2021 adalah 40,88 (C) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2022 belum ada karena baru akan direuiu di tahun 2022

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor Kecamatan Watang Sidenreng yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2022 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan

melihat kondisi dari Kecamatan Watang Sidenreng.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 sebesar

Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2022	3.626.344.000
2.	DPPA Perubahan Pertama	3.626.344.000
3.	DPPA Perubahan Kedua	3.212.215.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar 3.626.344.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.212.215.000,00 atau 97,01%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100 %, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,99 %.

Anggaran tahun 2022 dialokasikan sepenuhnya untuk menopang sasaran 4 yaitu Predikat Nilai Sakip. Sedangkan untuk tahun 2022 pengalokasian anggaran untuk sasaran 1, 2, dan 3 belum ada. Hal ini dikarenakan dampak covid yang masih sangat besar bagi perekonomian. Namun anggaran untuk membiayai pencapaian ketiga sasaran tersebut kami mengacu pada anggaran yang ada. Namun anggaran tersebut tidaklah cukup untuk mengakomodasikan seluruh kegiatan yang akan dikoordinasikan ke desa.

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di

atas adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dijabarkan dalam 4 sebagai berikut :
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 1. Pengadaan Mebel.
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 sesuai

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 3.626.344.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.583.050.800,-, Belanja barang dan Jasa Rp. 655.936.200,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 387.357.000,- sebesar 97,01 % sesuai tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Belanja Operasi	3.626.344.000,-	3.212.215.000,-
	Belanja Pegawai	2.158.050.800,-	2.158.922.000,-
	Belanja Barang Jasa	655.936.200,-	618.195.500,-
2.	Belanja Modal	387.357.000,-	435.097.500,-
	Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Mesin	47.625.000,-	95.365.500,-
	Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	339.732.000,-	339.732.000,-
	Total Anggaran Setelah Perubahan	3.626.344.000,-	3.212.215.000,-

Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatkan Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2022 belum dianggarkan di DPA/DPPA karena anggaran yang tidak mencukupi. Namun kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2022 secara rinci dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini :

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Tar Get	Reali sasi	Reali sasi %	Target	Realisasi Keuangan	Reali sasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CAKUPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100	2.158.922.000	2.067.172.225	97,01
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14	100	2.158.922.000	2.067.172.225	96,54
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	2.158.922.000	2.067.172.225	96,54
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	144.034.400	129.874.249	99,54
2.1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Gedung Kantor	2	2	100	17.676.100	17.644.550	100
2.2	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	83	83	100	20.997.500	20.997.500	98,84
2.3	Penyedia Fasilitas Kunjungan Tamu	20	20	100	16.933.800	8.627.200	100
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	80.927.000	75.104.999	98,87
2.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	2	100	7.500.000	7.500.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	102.304.700	36.000.000	100
3.1	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	100	100	100	102.304.700	36.000.000	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	237.929.600	224.972.228	99,75
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	2.235.600	2.121.000	100
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	30.660.000	26.567.928	98,83
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	3.072.000	3.072.000	
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	201.962.000	193.211.300	100
5	Pemeliharaan Badan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	48.953.300	47.172.198	99,63
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100	33.140.400	31.359.298	99,13
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	3	100	5.302.000	10.510.900	99,82
5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	3	100	10.510.900	5.302.000	100
2.	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	

6.1	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang	-	-	-	-	-	-
6.1	Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan	Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
3.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	100	100	518.125.000	430.675.500	
7.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	100	100	518.125.000	430.675.500	
7.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3	3	100	174.720.000	87.360.000	
7.2	Peningkatan Masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi dalam Forum Perencanaan	3	3	100	2.700.000	2.700.000	
7.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3	3	100	339.732.000	339.705.500	
7.4	Evaluasi Kelurahan		3	3	100	973.000	910.000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	100	100	973.000	973.000	
8.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	973.000	973.000	
8.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dana		3	3	100	973.000	-	
9.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3	3	100	973.000	520.000	
9.1	Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang terkait dengan Kewenangan	3	3	100	973.000	520.000	
JUMLAH					100	3.212.215.000	2.936.386.400	97,01

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,32	Tinggi
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	70,56 %	Sedang
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat nilai sakisip (2022)	40,88	Rendah

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Watang Sidenreng, 27 Januari 2022
CAMAT WATANG SIDENRENG

HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 198101092000121001

The background of the page features a large, faded watermark of the official logo of Sidenreng Regency. The logo is a shield-shaped emblem with a green background and a gold border. It depicts a central figure holding a torch, surrounded by a laurel wreath and two crossed banners with red and white stripes. The text 'SIDENRENG' is visible at the bottom of the emblem.

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
KECAMATAN WATANG SIDENRENG**

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			KET.
		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		
		(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.212.215.000	99	3.212.215.000	99	99	2.936.386.400	99	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.158.922.000	99	2.158.922.000	99	99	2.067.172.225	99	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.158.922.000	99	2.158.922.000	99	99	2.067.172.225	99	-
KANTOR CAMAT	1.053.293.000	99	1.053.293.000	99	77	869.214.175	77	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.034.400	100	144.034.400	100	99	129.874.249	99	
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penereangan Bangunan Kantor	17.676.100	100	17.676.100	100	100	17.644.550	100	
Penyedia peralatan Rumah tangga	16.933.800	100	16.933.800	100	77	8.627.200	77	
Fasilitas Kunjungan Tamu	20.997.500	100	20.997.500	100	100	20.997.500	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.927.000	93	80.927.000	93	99	75.104.999	99	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.304.700	77	102.304.700	77	77	36.000.000	77	
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	102.304.700	77	102.304.700	77	77	36.000.000	77	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.929.600	100	237.929.600	100	95	224.972.228	95	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.235.600	91	2.235.600	91	99	2.121.000	99	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.660.000	82	30.660.000	82	95	26.567.928	95	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.072.000	100	3.072.000	100	100	3.072.000	100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.962.000	100	201.962.000	100	98	193.211.300	98	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.953.300	100,00	48.953.300	100,00	99	47.172.198	99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	33.140.400	100	33.140.400	100	99	31.359.298	99	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	10.510.900	100	10.510.900	100	100	10.510.900	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.302.000	100	5.302.000	100	100	5.302.000	100	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	518.125.000	99	518.125.000	99	99	430.675.500	99	

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174.720.000	98	174.720.000	98	89	87.360.000	89	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.700.000	100	2.700.000	100	100	2.700.000	100	
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	339.732.000	100	339.732.000	100	-	339.705.500	-	
Evaluasi Kelurahan	973.000	100	973.000	100	-	910.000	-	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	973.000	99	973.000	99	0	-	0	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Dana Aset	973.000	99	973.000	99		-		
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	973.000	99	973.000	99	53	520.000	53	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	973.000	53	973.000	53		520.000		
JUMLAH	3.212.215.000		3.212.215.000		96	2.936.386.400		

Sumber Data : Laporan Realisasai Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Watang Sidenreng, 27 Januari 2022
CAMAT WATANG SIDENRENG

HIDATULLAH ABBAS , S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19810109 200212 1 001

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2022

NO.	UNIT LAYANAN	IMPORTANT DAN PERFORMANCE			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA-RATA PELAYANAN	RATA HARAPAN	NILAI GAP			
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	B	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	B	BAIK
3.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,31	3,52	0,21	82,70	B	BAIK
4.	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	B	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	B	BAIK
6.	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	B	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK
8.	KECAMATAN PITU RIAWA	3,24	3,89	0,65	80,94	B	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	B	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGNGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	B	BAIK
11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	B	BAIK
RATA-RATA		3,26	3,65	0,38	81,54	BAIK	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
 ATAS PELAYANAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2022**

NO.	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN PERFORMANCE			ATRIBUSI KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	B	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	B	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	B	Baik
Rata-Rata		3.277	3.232	0.730	Baik	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

**PREDIKAT NILAI SAKIP
KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	HASIL EVALUASI
A.	Perencanaan Kinerja	30	17.64
B.	Pengukuran Kinerja	25	7.81
C.	Pelaporan Kinerja	15	4.68
D.	Evaluasi Kinerja	10	0.00
E.	Pencapaian Kinerja	20	10.75
JUMLAH		100	40.88

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2021 oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2022

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	MASYARAKAT YANG DIUNDANG	MASYARAKAT YANG HADIR	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022	100 Orang	79 Orang	79 %
2.	Pelaksanaan Tudang Sipulung tingkat Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022	80 Orang	48 Orang	60 %
Jumlah		180 Orang	127 Orang	70,56 %

Sumber Data : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022

Watang Sidenreng, 27 Januari 2022
CAMAT WATANG SIDENRENG

HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19810109 200012 1 001

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN 2022**

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja				Anggaran			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,14	82,70	B				
1.1		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.212.215.000	2.936.386.400	97,01
1.2			Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	Persentase	72	70,56	98				
1.3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Persentase	100	100	100				
1.4		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat nilai sakin (2020)	Nilai	40,88 (C)	40,88 (C)	C				